

KESIMPULAN

Isu-isu tentang lingkungan merupakan salah satu isu penting yang dibahas dalam konferensi internasional, permasalahan ini muncul di karenakan pembangunan yang dilakukan secara terus-menerus tanpa diimbangi upaya untuk melestarikannya. Seiring dengan perkembangan ekonomi yang begitu pesat yang di dukung oleh perkembangan industri dan teknologi yang canggih membawa banyak perubahan pada alam yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya perubahan iklim atau *Climate Change*.

Perubahan iklim atau *Climate Change* ditandai dengan meningkatnya suhu di permukaan bumi yang dipicu oleh meningkatnya jumlah konsentrasi CO₂ dan beberapa gas lain seperti sulfur dioksida (SO₂), nitrogen monoksida (NO) dan nitrogen dioksida (NO₂) serta beberapa senyawa organik seperti gas metana (CH₄) dan khloro fluoro karbon (CFC), di atmosfer yang mengakibatkan cuaca yang sangat ekstrem dan terganggunya ekosistem makluk hidup di muka bumi.

Menyadari akan dampak dari perubahan iklim yang kian memburuk bagi kelangsungan makluk hidup di bumi maka di bentuklah *United Nation Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) yang diawali dengan pertemuan KTT Bumi (Earth Summit) pada tanggal 3 – 14 Juni 1992 di Rio de Janeiro, Brazil yang dihadiri oleh perwakilan 172. Pertemuan anggota yang dilakukan setiap tahunnya yang dikenal dengan nama *Conference of Parties* (COP) yang dilaksanakan semenjak tahun 1995 yang diikuti oleh negara-negara yang berada di kawasan

Asia, Afrika, Amerika Latin dan Karibia, Eropa Bagian Timur dan Tengah, Eropa barat dan daerah lainnya.

Adapun isu utama yang di diskusikan yaitu isu lingkungan, termasuk di dalamnya pemanasan global, kerusakan hutan dan spesies langka, serta pengembangan industri yang ramah lingkungan. Setelah Konvensi Kerangka Kerjasama Persatuan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim (*United Nations Framework Convention on Climate Change* – UNFCCC) disetujui pada KTT Bumi (Earth Summit) tahun 1992 di Rio de Janeiro, Brazil. Negara-negara peserta konvensi mulai melakukan negosiasi untuk membentuk suatu aturan yang lebih detil dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Selama COP 1 dan COP 2 hampir tidak ada kesepakatan yang berarti dalam upaya penurunan emisi GRK (Gasa Rumah Kaca).

Pada COP 3 menghasilkan sebuah perjanjian internasional yang tertuang dalam Protokol Kyoto yang diadopsi pada pertemuan ketiga *Conference of Parties* (COP) UNFCCC di Kyoto, Jepang tanggal 11 Desember 1997 dan mulai berlaku pada 16 Februari 2005 setelah berhasil mengumpulkan jumlah minimum negara yang meratifikasinya, 187 negara telah menandatangani dan meratifikasi Protokol Kyoto. Periode komitmen pertama dimulai pada tahun 2008 dan berakhir tahun 2012.

Protokol Kyoto merupakan perjanjian internasional yang terkait dengan Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang perubahan iklim, yang mengikat berbagai pihak terkait untuk menetapkan target pengurangan emisi yang berlaku secara

internasional. Menyadari bahwa negara-negara maju atau negara-negara Annex II sebagai aktor yang bertanggung jawab atas meningkatnya emisi gas rumah kaca di atmosfer, maka Protokol Kyoto menitik beratkan beban penurunan emisi kepada negara-negara Annex I di bawah prinsip "*Common but differentiated responsibilities*", sedangkan negara-negara berkembang atau negara-negara Non Annex I tidak bertanggung jawab atas penurunan emisi gas rumah kaca akan tetapi dapat berpartisipasi dalam proyek yang dibangun negara-negara Annex I tersebut.

Negara-negara yang meratifikasi Protokol Kyoto yang terdiri dari 37 negara-negara industri dan Uni Eropa berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sampai dengan 5,2 % di bawah tingkat emisi tahun 1990. Negara – negara industri, yang disebut sebagai anggota Annex I berkomitmen untuk membuat kebijakan dan langkah-langkah dalam mengurangi emisi GRK secara kolektif sebesar 5,2% di bawah tingkat emisi tahun 1990 atau sebesar 13.7 Gt 2008-2012.

Seluruh anggota Annex I juga harus memberikan laporan khusus yang disebut dengan *National Communication* (NC), yang berisi tentang informasi emisi GRK negara mereka masing-masing dan menjelaskan langkah-langkah yang telah dilakukan untuk menerapkan komitmen tersebut. Hal ini dilakukan secara berkala dan kemudian memberikan laporan tahunan terpisah mengenai emisi GRK mereka, sedangkan negara-negara maju yang disebut sebagai Annex I juga harus mendorong dan memfasilitasi transfer teknologi yang ramah lingkungan kepada negara-negara berkembang dan negara yang mengalami transisi ekonomi. Selain itu mereka juga harus memberikan pendanaan untuk membantu negara-negara

berkembang menerapkan komitmen mereka melalui *Global Environment Facility* serta melayani mekanisme pendanaan dan kerjasama bilateral maupun multilateral. Setelah Protokol Kyoto ada beberapa konferensi yang membahas tentang perubahan iklim, diantaranya adalah konferensi Cancun yang merupakan konferensi yang paling kontroversial sebelum di putuskannya Protokol Kyoto komitmen kedua.

Pada konferensi Cancun Jepang menunjukkan perubahan sikapnya melalui *statement* yang dilontarkannya pada awal konferensi. Sikap Jepang yang pada awalnya berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan terikat pada Protokol Kyoto Komitmen Pertama kemudian berubah drastis menjadi menolak diperpanjangnya Protokol Kyoto komitmen kedua. Penolakan Jepang terhadap komitmen kedua Protokol Kyoto didasari atas tidak adanya komitmen dari kedua negara emiter emisi gas rumah kaca terbesar di dunia yaitu Amerika Serikat dan China dalam konferensi Cancun, kedua negara ini tidak menyatakan kesediaannya untuk terikat dalam Komitmen Kedua Protokol Kyoto. Alasan inilah yang membuat Jepang enggan untuk menuliskan target pada Protokol Kyoto komitmen kedua. Meskipun demikian, Jepang akan tetap sukarela untuk mencapai penurunan emisi tanpa harus terikat pada komitmen kedua Protokol Kyoto.

Hal ini di buktikan Jepang melalui kontribusinya dalam mengurangi emisi gas rumah kaca melalui skema emisi yang telah di tetapkan dalam Protokol Kyoto, mekanisme yang di gunakan Jepang adalah Mekanisme Pembangunan Bersih (*Clean Development Mechanism*) yaitu gabungan antara Implementasi Bersama

(ID) dan Perdagangan Emisi Internasional (IET) yang dapat dilaksanakan antara

negara-negara maju (*Annex*) dan negara-negara berkembang yang tergabung dalam (*Non-Annex*) .

Program Bantuan Hibah Jepang untuk Lingkungan dan Perubahan Iklim merupakan skema baru bantuan hibah yang didirikan pada tahun fiskal 2008 dan merupakan bagian dari program "*Cool Earth Partnership*" yang di umumkan Pemerintah Jepang pada bulan Januari 2008 dengan tujuan untuk membantu negara-negara berkembang terhadap perubahan iklim. Untuk melaksanakan proyek pemerintah Jepang membuat sebuah lembaga untuk mengelola dan mengawasi proyek-proyek di negara berkembang yang sebut JICS (*Japan International Cooperation System*) yang berfungsi sebagai agen pengadaan dan pengelola dana yang disediakan, pengadaan peralatan dan jasa yang diperlukan, serta mengawasi proyek-proyek secara keseluruhan sesuai dengan kontrak dengan pemerintah negara-negara berkembang (*Non-Annex*) sejak berdirinya bantuan hibah di FY2008.

Sebagai salah satu upayanya Jepang dengan mendirikan mekanisme keuangan baru, yang disebut dengan "*Cool Earth Partnership*". Melalui ini, Jepang akan bekerja sama secara aktif dengan negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi, upaya untuk meningkatkan efisiensi energi, dan secara bersamaan akan mempermudah bantuan kepada negara-negara berkembang yang menderita dampak parah sebagai akibat dari perubahan iklim. Selain itu, Jepang juga bertujuan untuk menciptakan dana multilateral baru bersama Amerika Serikat dan Inggris, serta meminta partisipasi dari donor lain.

Jepang menggunakan instrumen tersebut untuk memperkuat solidaritas dengan negara-negara berkembang dan bekerja menuju pengurangan gas rumah

kaca secara global. Mekanisme keuangan untuk membantu negara-negara berkembang untuk mengatasi perubahan iklim. Mulai tahun 2009, Jepang telah menyediakan dana kurang lebih sebesar US \$ 10 milyar (JPYen 1.250 miliar) dalam agregat selama lima tahun kedepan. Bantuan akan diberikan kepada negara-negara berkembang yang berada di kawasan Afrika, Asia, Amerika Latin dan negara-negara kepulauan Pasifik sebagai upaya untuk mengurangi emisi GRK dan mencapai pertumbuhan ekonomi dengan cara yang kompatibel.

Mekanisme yang di gunakan Jepang dalam berbagai proyeknya yaitu Mekanisme Pembangunan Bersih (CDM) yang akan menghasilkan Emisi Disertifikasi (*Certified Emission Reduction*), dengan menggunakan Mekanisme Pembangunan Bersih (CDM) Jepang bekerjasama dengan negara-negara Non-Annex untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Melalui Proyek CDM Jepang akan memperoleh keuntungan dari proyek yang dibangunnya, Proyek-proyek tersebut dapat memperoleh *Certified Emission Reduction (CER)*, kredit masing-masing yang setara dengan satu ton CO₂ yang dapat dihitung dalam memenuhi target Protokol Kyoto, selain memberikan keuntungan terhadap Negara-negara *Annex* mekanisme ini juga memberika dampak positif pada Negara-negara *Non Annex* dimana negara-negara ini memperoleh bantuan secara finansial yang akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pembanguan berkenanjutan (*Sustainable Development*) dan transfer teknologi dari negara-negara *Annex* .

Investasi dalam proyek-proyek mitigasi perubahan iklim di negara berkembang (*Non Annex*) akan memperbaiki taraf kehidupan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja atau peningkatan kegiatan ekonomi. Kontribusi yang di

berikan CDM seperti pengentasan kemiskinan, akses ke energi yang efisien, penerangan dalam kegiatan rumah tangga, perbaikan kondisi kualitas udara, perbaikan kualitas hidup, pengurangan biaya, peningkatan kualitas dalam pekerjaan dan keterampilan.

Temuan – temuan di atas menunjukkan bahwa adanya kepedulian Jepang terhadap masalah lingkungan, dan partisipasinya dalam Isu-isu Internasional khususnya mengenai masalah yang ditimbulkan akibat perubahan iklim. Melalui kebijakan lingkungan dan kebijakan luar negerinya Jepang berupaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, sekaligus bentuk komitmen sukarela Jepang dalam Protokol Kyoto komitmen kedua. Dengan adanya penelitian ini di harapkan adanya kesadaran masyarakat untuk peduli terhadap masalah lingkungan yang merupakan salah satu isu penting yang di bahas di dunia Internasional, dan memberikan manfaat terhadap hubungan internasional antara negara-negara di dunia dalam menjalin kerjasama melalui bantuan proyek dan hibah yang di berikan Jepang. Semoga penelitian ini memberikan manfaat bagi pembaca dan impen